

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Tantangan dan permasalahan pada era ini dalam suatu negara semakin kompleks, yang memaksa pemerintah untuk memahami banyaknya permasalahan yang ada. Salah satunya mengenai masalah kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat di daerah perkotaan seperti perkembangan jumlah pengangguran, kemiskinan dan tingkat kriminalitas sehingga permintaan jumlah perumahan atau kawasan hunian di perkotaan semakin besar. Padatnya jumlah penduduk di perkotaan dengan tidak adanya dukungan untuk kawasan permukiman yang luas akan mengakibatkan kawasan seperti rel kereta api yang bukan merupakan wilayah permukiman membentuk kawasan permukiman baru.

Permukiman merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dimana kebutuhan dan perumahan akan selalu meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk, terutama kota yang berkembang. Pertumbuhan penduduk merupakan masalah utama yang mendorong pesatnya perkembangan pertumbuhan permukiman di perkotaan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1, tentang bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan

¹Juck, Kuswartojo. 2005.Perumahan dan Permukiman Indonesia.Bandung :ITB Purwanto Erwan & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015.

Kawasan Permukiman. Hal tersebut juga merupakan hak dasar yang harus dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.²

Maka dari itu perkembangan suatu kota tidak terlepas dari jumlah penduduk yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang terus bertambah adalah sulitnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, dengan terbatasnya kemampuan dalam pembangunan perumahan di perkotaan yang layak huni dan semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat yang mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35,291 Hektar kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Diprediksikan 68% masyarakat Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga kawasan kumuh akan terus meningkat.³

Kota Jambi merupakan salah satu kota dengan luas keseluruhan wilayah Kota Jambi \pm 20.538 hektar terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan, dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Jambi sebesar 604.738 jiwa per tahun 2020.⁴ Salah satu permasalahan di Kota Jambi adalah padatnya bangunan penduduk di tengah-tengah kota, yang sudah tidak terorganisasi dengan baik, sehingga menjadi

²May Istikasari dan Parfi Khadiyanto.2014.Identifikasi Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Jambi.Jurnal Ruang Vol. 2 NO 4. Universitas Diponegoro

³Robi Cahyadi Kurniawan. 2018.Opini : Bandar Lampung Kotaku 2020. Setia Lampung

⁴Badan Pusat Statistik, Kota Jambi dalam Angka 2020. Diakses 16 Juni 2021

salah satu isu utama adanya permasalahan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Dari Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi, mencatat luas permukiman kumuh di Kota Jambi mencapai 986,57 Hektar terdiri dari 38 kawasan permukiman kumuh.⁵

Kriteria kumuh sendiri terbagi menjadi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan dan potensi bahaya kebakaran. Permukiman kumuh lebih banyak disebabkan karena adanya urbanisasi yang terus menerus terjadi, sehingga adanya permukiman kumuh ini juga berdampak buruk bagi kondisi lingkungan di wilayah kota tersebut, selain mengakibatkan lingkungan terlihat kotor (kumuh), kondisi ini juga dapat berdampak kepada timbulnya sarang penyakit yang dapat menyerang kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan penanganan serius dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁵Dilihat dari Peraturan Daerah Kota Jambi No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Peningkatan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.⁶

“Permukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat”.

Berdasarkan dengan apa yang sudah ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019⁷, yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/Prt/M/2018, tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, berikut adalah 8 (Delapan) indikator yang menggambarkan adanya pemukiman kumuh:

1. Bangunan gedung, hal ini dilihat dari aspek ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.
2. Jalan lingkungan, hal ini dilihat dari aspek cakupan jaringan pelayanan, kualitas permukiman jalanan.

⁶Dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2016, tentang Peningkatan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

⁷Dilihat dari Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015, Tentang rencana pembangunan Jangka menengah Nasional tahun 2015-2019

3. Air minum, hal ini dilihat dari aspek ketidaksediaan akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4. Drainase lingkungan, hal ini dilihat dari aspek ketidakterediaan drainase, ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, kualitas konstruksi drainase
5. Pengelolaan air limbah, hal ini dilihat dari aspek sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis.
6. Pengelolaan persampahan, hal ini dilihat dari aspek prasarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis
7. Proteksi kebakaran, hal ini dilihat dari aspek ketidakterediaan sistem proteksi kebakaran secara aktif dan pasif, ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran.⁸

Ketujuh indikator tersebut merupakan gambaran permasalahan disalah satu permukiman kumuh di Kota Jambi yaitu di Kelurahan Legok, berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhannya dinyatakan sebagai permukiman kumuh berat dengan prioritas tinggi. Upaya yang dilakukan untuk pengentasan Permukiman Kumuh adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”.

⁸Menurut permen PUPR No.14/Prt/M/2018 tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dalam menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Jambi di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 166 Tahun 2016 dalam Peraturan Walikota tersebut terdapat 38 kawasan kumuh yang terletak di 62 kelurahan dengan total luas kawasan kumuh 986,57 Hektardi Kota Jambi. Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi termasuk salah satu kelurahan kumuh yang terdapat di wilayah Kota Jambi.⁹ Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Jambi, merupakan kelurahan yang berada di Kota Jambi, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Batanghari, sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Murni,Sebelah barat berbatasan dengan kel.Sungai Puri dan sebelah timur dengan kel. Beringin Kec. Pasar Jambi.¹⁰ Kawasan tersebut mendapat Program KOTAKU dari Pemerintah Kota Jambi karena Kelurahan Legok merupakan kawasan permukiman kumuh yang memiliki banyak permasalahan seperti kurangnya pembangunan yang memadai, lingkungan yang sangat sempit dan kotor dan kurangnya air minum yang bersih dan juga keamanan yang ada di dalam kurang memadai untuk kelurahan tersebut.

Program KOTAKU di Kelurahan Legok sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian PUPR namun belum terlaksana secara menyeluruh. Artinya masih ada wilayah maupun daerah di Kelurahan Legok yang belum mendapatkan penanganan melalui Program KOTAKU. Sedangkan kelurahan lain yang juga memperoleh Program KOTAKU sudah ditangani secara menyeluruh.Seperti Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi yang melalui Program

⁹Dilihat dari Peraturan Walikota No 166 Tahun 2016 Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi

¹⁰<https://www.adiman.web.id/kodepos/k-36121-legok-kec-telanaipura>.Diakses pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 21.30 WIB

KOTAKU dengan kalaborasi penanganan kumuh di Kelurahan Telanaipura ada kalaborasi antara Pemerintah Kota Jambi dengan Program KOTAKU pada tahun 2018 dalam pengetasan permukiman kumuh di Kelurahan Telanaipura yang telah mendapat perubah fasilitasi di kelurahan tersebut menjadi lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari PUPR perubahan yang dialami Kelurahan Telanaipura diantaranya 277 meter jalan dilingkungan RT 06 dan 07, dibangun juga 633 drainase, dibangunya Pojok Teras Baca dan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang bermanfaat bagi 85 KK, yang 59 KK diantaranya masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian melalui Program KOTAKU masyarakat Telanaipura kini dapat menikmati akses jalan berkualitas, drainase yang memadai, ruang edukasi, serta arena bermain untuk anak-anak PAUD.

Begitupun dengan Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kota Jambi juga sudah mendapatkan penanganan secara menyeluruh melalui Program KOTAKU dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari PUPR perubahan yang dialami oleh Kelurahan Orang Kayo Hitam dengan adanya Program KOTAKU adalah diperbaikinya jalan sepanjang 122 meter, adanya pembuatan drainase 140 meter, serta adanya rencana pemerintah di RT 11 untuk membuat daerah tersebut menjadi pusat kuliner kota, ruang-ruang terbuka publik yang dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Hal ini dilakukan karena sebelumnya RT 11 di kelurahan tersebut masih terisolir dari pemukiman masyarakat. Dengan adanya Program KOTAKU, kini Kelurahan Orang Kayo Hitam telah memiliki akses jalan, drainase, dan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Maka dari itu Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi mendapatkan Program

KOTAKU dari Pemerintah untuk memaksimalkan Program KOTAKU yang sebelumnya belum terlaksana dengan maksimal, sehingga dapat mengubah Kelurahan Legok secara menyeluruh agar tidak kumuh lagi dengan fasilitas yang lebih memadai. Berikut adalah tabel kelurahan yang berada di Kota Jambi dan mendapatkan Program KOTAKU dari Pemerintahan.

Tabel 1.1 Deskripsi Kelurahan Kumuh di Kota Jambi

Nama Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Batas Wilayah	Jumlah Penduduk	Luas Permukiman Kumuh
Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi	198,00 Ha	-Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Batanghari -Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel.Murni -Sebelah barat berbatasan dengan kel.Sungai Putri -Sebelah timur berbatasan dengan kel. Beringin, kec. Pasar Jambi	2851 Jiwa	147,34 Ha
Kelurahan Orang kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi	26,87Ha	-Berbatasan dengan Pasar Jambi -Beringin -Sungai Asam	12 532 Jiwa	10,06 Ha
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung	182,35 Ha	-Kebun Handil -Talang Jauh -Lebak Bandung -Payo Lebar -Handil Jaya	7.816 Jiwa	45,41 Ha
Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanai, Kota Jambi	26,48 Ha	-Simp. IV Sipin -Buluran Kenali -Teluk Kenali	4646 Jiwa	2,55 Ha

Sumber : Kotaku.pu.go.id dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Data diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi merupakan satu dari empat kelurahan kumuh yang memiliki permasalahan jalan lingkungan yang rusak karena masih berupa pengerasan tanah, selain itu juga terdapat jalan yang belum dilengkapi drainase yang memadai. Dengan itu rumah penduduk yang padat juga menjadi permasalahan di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi karena menyebabkan pemukiman penduduk yang terlihat kumuh, ditambah lagi belum adanya program bedah rumah yang dilakukan pemerintah di kelurahan tersebut.

Dari permasalahan di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi.Pemerintahan mencanangkan kebijakan yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai alternatif dalam pemecahan permasalahan pemukiman kumuh di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi yaitu Program Kotaku (Kota tanpa kumuh). Program KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.¹¹ Hal ini sejalan dengan Surat Edaran No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh menjelaskan bahwa Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu ini sebagai referensi guna melengkapi penelitian sebelumnya yang tidak menyentuh isu yang sedang diteliti. Penelitian merujuk pada Novie Utami Putri Rusmanto dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang. Kota Malang yang menjelaskan tentang salah satu kelurahan di Kota Malang yaitu kelurahan Kidul Dalam yang mendapat Program KOTAKU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap tujuan Program KOTAKU dilandasi oleh visi dan misinya. Selain itu, terdapat rasa saling membutuhkan antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemerintah mempercayai PT. INDANA untuk membantu penanganan permukiman kumuh di

¹¹<http://kotaku.pu.go.id/> diakses 14 desember 2020 pukul 13:45

Kota Malang serta PT. INDANA menaruh harapan besar kepada pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kegiatan yang dilakukan PT. INDANA. Kolaborasi Program KOTAKU berjalan sesuai dengan porsi tugas masing-masing. Meski tidak ada aturan tertulis antara pemerintah dan pemangku kepentingan, kedua belah pihak bisa menjalankan perannya masing-masing.

Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur dan tugas terhadap pemangku kepentingan terkait karena tidak ada aturan yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, yang dapat mengakses setiap laporan pertanggungjawaban hanya stakeholder. Selama program berlangsung, kawasan kumuh di Kota Malang mengalami penurunan. Kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholders* berjalan dengan lancar, namun terdapat kendala dalam koordinasi antar sesama instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan terabaikan dan tanggung jawab terbuang karena mereka tidak memahami tugas dan perannya dengan baik. Kendala terakhir terletak pada anggaran yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, kendala tersebut harus diminimalkan dengan melakukan koordinasi secara rutin.¹²

Penelitian kedua merujuk kepada Shinta Arista Lamsi dengan judul Efektivitas Program (KOTAKU) Dalam Peningkatan Dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019). Dimana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

¹²Skripsi, Novie Utami Putri Rusmanto. Yang berjudul " *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018

efektivitas program tersebut dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Sugiyono. Lokasi penelitian dilaksanakan di kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, kendala dalam efektivitas program di Kelurahan Kangkung dimana peran serta masyarakat Kelurahan Kangkung yang masih sangat rendah, kurangnya partisipasi masyarakat serta kerjasama yang baik dalam menjalankan program menjadikan tahap ini belum dapat berjalan maksimal.

Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun faktor pendukung dari program adalah ketersediaan dana yang memadai sehingga memudahkan dalam kegiatan pembangunan. Adapun faktor penghambat dari Program KOTAKU adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan program, kurangnya kerjasama antar institusi pemerintah, dengan Koordinator program, atau Koordinator Program dengan Masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, penelitian ini terfokus terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi

¹³Skripsi, Shinta Arista Lamsi. Yang berjudul "Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Peningkatan Dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2019), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, 2019

permukiman kumuh di Kelurahan Legok Kota Jambi. Sedangkan penelitian Novie Utami Putri Rusmanto memfokuskan kepada kolaborasi antara pemerintahan dan pemegang kepentingan untuk saling bekerja sama dalam menangani dan mengatasi masalah permukiman kumuh di Malang. Sedangkan penelitian kedua yakni penelitian Shinta Arista Lamsi berfokus kepada pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan Program KOTAKU. Harapan peneliti, penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam membenahi permasalahan di Kelurahan Legok, khususnya permukiman kumuh. Baik dari akses jalan, drainase, pembangunan dan masalah lainnya.

Berdasarkan tujuan dari Program KOTAKU, maka alasan penulis tertarik untuk meneliti di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi terkait analisis kebijakan Pemerintah Jambi. Oleh karenanya penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Efektivitas Kebijakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Sejuahmana Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program (KOTAKU) di Kelurahan Legok dalam menangani permasalahan permukiman kumuh ?
- 1.2.2 Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Program (KOTAKU) dalam pemenuhan fasilitas permukiman yang layak bagi masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Kebijakan Program (KOTAKU) dalam menangani permasalahan permukiman kumuh
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota dalam pemenuhan bagi masyarakat Kota Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang hal yang sama dan diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai Program KOTAKU dalam pengentasan permukiman kumuh.

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang bagaimana Program KOTAKU di Kota Jambi dalam pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Khususnya mengenai pengembangan Program KOTAKU di Kota Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi Program KOTAKU dalam pengentasan permukiman kumuh.

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan memberi masukan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk lebih mengembangkan Program KOTAKU di daerah-daerah Jambi lainnya yang masih terbilang kumuh.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi Informasi bagi masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Jambi melalui Program KOTAKU

dalam Pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi.

1.5. Landasan Teori

Menurut Robert Eyestone Kebijakan Publik dapat didefenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Defenisi ini dapat di klasifikasikan sebagai *demokratik governance*, dimana di dalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.¹⁴Dalam menurut Leo Agustino, Kebijakan adalah satu studi dalam bidang ilmu sosial yang berkembang sangat pesat. Ini karena kontribusi nyatanya pada kehidupan manusia, sehingga banyak pihak berusaha untuk mendalami dan mempelajarinya. Berbagai masalah dan fenomena sosial yang terjadi dapat di dekati dan (coba) diselesaikan dengan kebijakan publik. Namun menariknya, tidak semua pengambilan atau pembuat keputusan serta aktor kebijakan mempelajari kebijakan publik sebagai alat sekaligus upaya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.¹⁵

Kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu aktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam kebijakan publik

¹⁴Robert Eyestone (1971). *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril, hlm. 18.

¹⁵Leo, Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

terdapat aspek-aspek yang mempengaruhinya. Menurut Edwards III aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu :

1. Kewenangan atau Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi atau strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan bahkan orang lain menginterpretasikan suatu ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

3. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu

dilakukan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

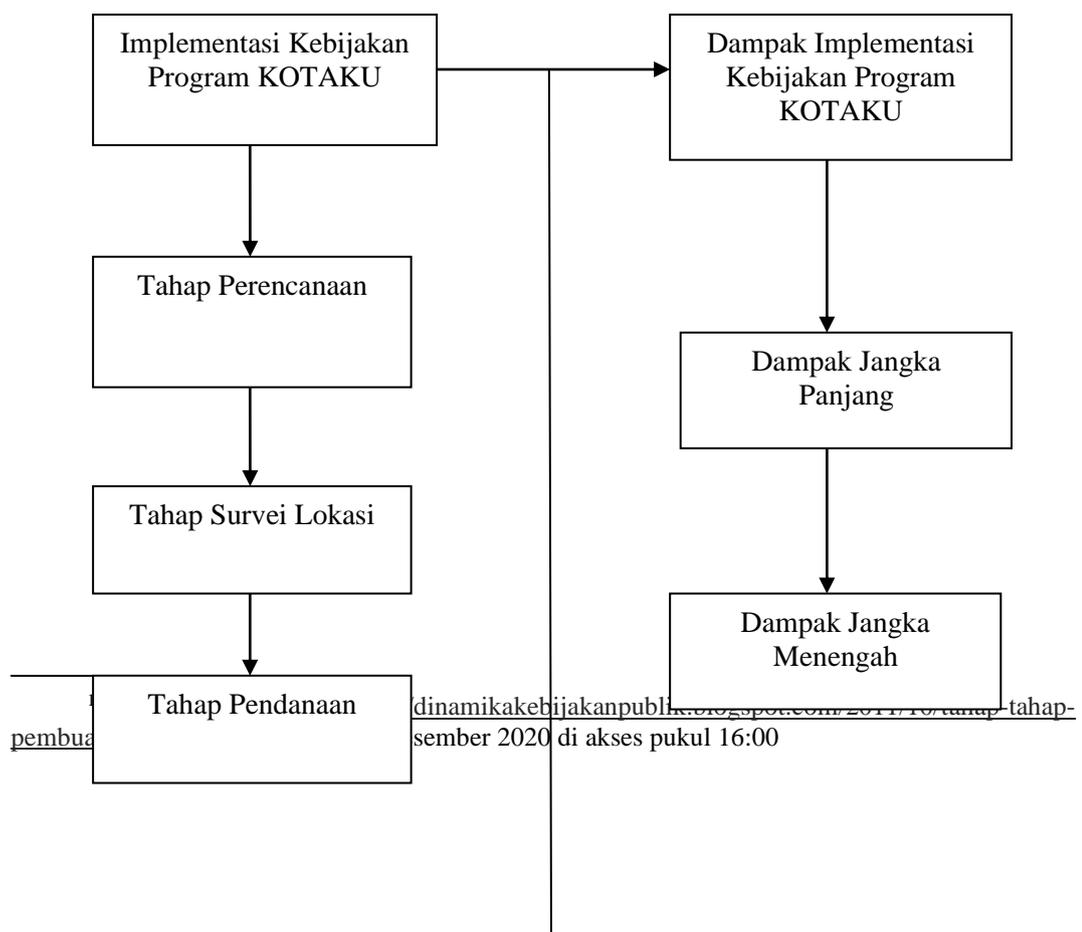
4. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana

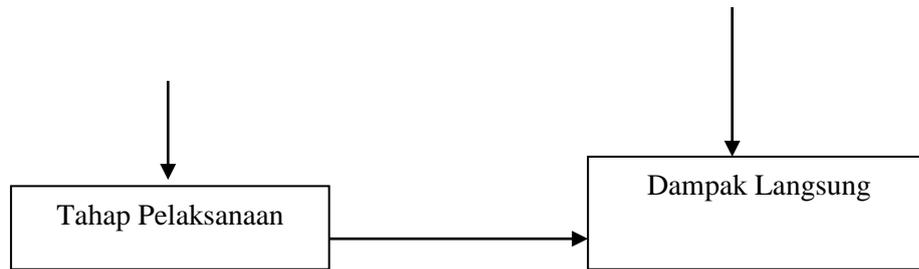
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, dan kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka di mungkin proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.¹⁶

¹⁶Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhan, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol;No.01;20171-12

Menurut tahap pelaksanaan kebijakan publik menurut William N. Dunn salah satunya dengan tahap implementasi kebijakan suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah. kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing. Proses implementasi secara grafik dapat ditampilkan seperti gambar berikut ini¹⁷

Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan Program KOTAKU





Sumber :Nurhasanah.2019.Implementasi Kebijakan Program KOTAKU Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No 1. Universitas Islam Malang. April 2019 hal.58-70

Dengan berdasarkan pengukuran efektivitas menurut pendapat Budiani (mengenai ukuran efektivitas program didalam organisasi) yaitu : 1) Ketepatan sasaran program ; 2) Sosialisasi program ; 3) Tujuan program ; 4) Pemantauan Program. Maka didapati hasil sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program berkaitan erat dengan sejauh mana program tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan. Jika program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka program tersebut berjalan baik dan sesuai sasaran, namun jika program tersebut kurang

berjalan baik maka perlu di lakukan evaluasi agar mencapai ketepatan sasaran program.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pelaksana program dengan melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat agar mengetahui tujuan, manfaat dan dampak dari program yang akan dilaksanakan. Pendekatan sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh, hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jika informasi yang diberikan sudah diterima oleh masyarakat luas maka program akan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Tujuan program

Tujuan program adalah hasil akhir yang akan dicapai dari terlaksananya program tersebut. Tujuan program akan berjalan baik jika proses komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana program dijalankan dengan baik pula. Tujuan Program KOTAKU adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh, untuk menurunkan luas permukiman kumuh, serta meningkatkan pemanfaatan infrastruktur dan pelayanan dipermukiman kumuh.

4. Pemantauan program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program tersebut. Pemantauan juga dapat menjadi proses evaluasi bagi pelaksana program untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dari terlaksananya program tersebut. Dengan adanya pemantauan maka pelaksana program dapat mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan dievaluasi untuk memperbaiki program kearah yang lebih baik.¹⁸

1.6. Kerangka Pikir

Permasalahan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak dijumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Permasalahan di pemukiman kumuh menjadi khawatir pemerintah sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menjadi kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia

¹⁸Ni Wayan, Budiani:2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial Ruang Vol. 2 No 1. Universitas Undayana

melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah layak.¹⁹

Saat ini Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berjenjang dari menteri hingga pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk seluruh aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Strategi Pelaksanaan Kebijakan, Implementasi Percepatan Penanganan Kumuh 2016-2019.²⁰ Menanggapi hal tersebut Kota Jambi berupaya untuk terus melakukan pengurangan permukiman kumuh, dengan salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kawasan kumuh adalah dengan mengurangi kawasan kumuh yang ada di kota dengan meningkatkan kualitas perumahan yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan keputusan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Jambi.

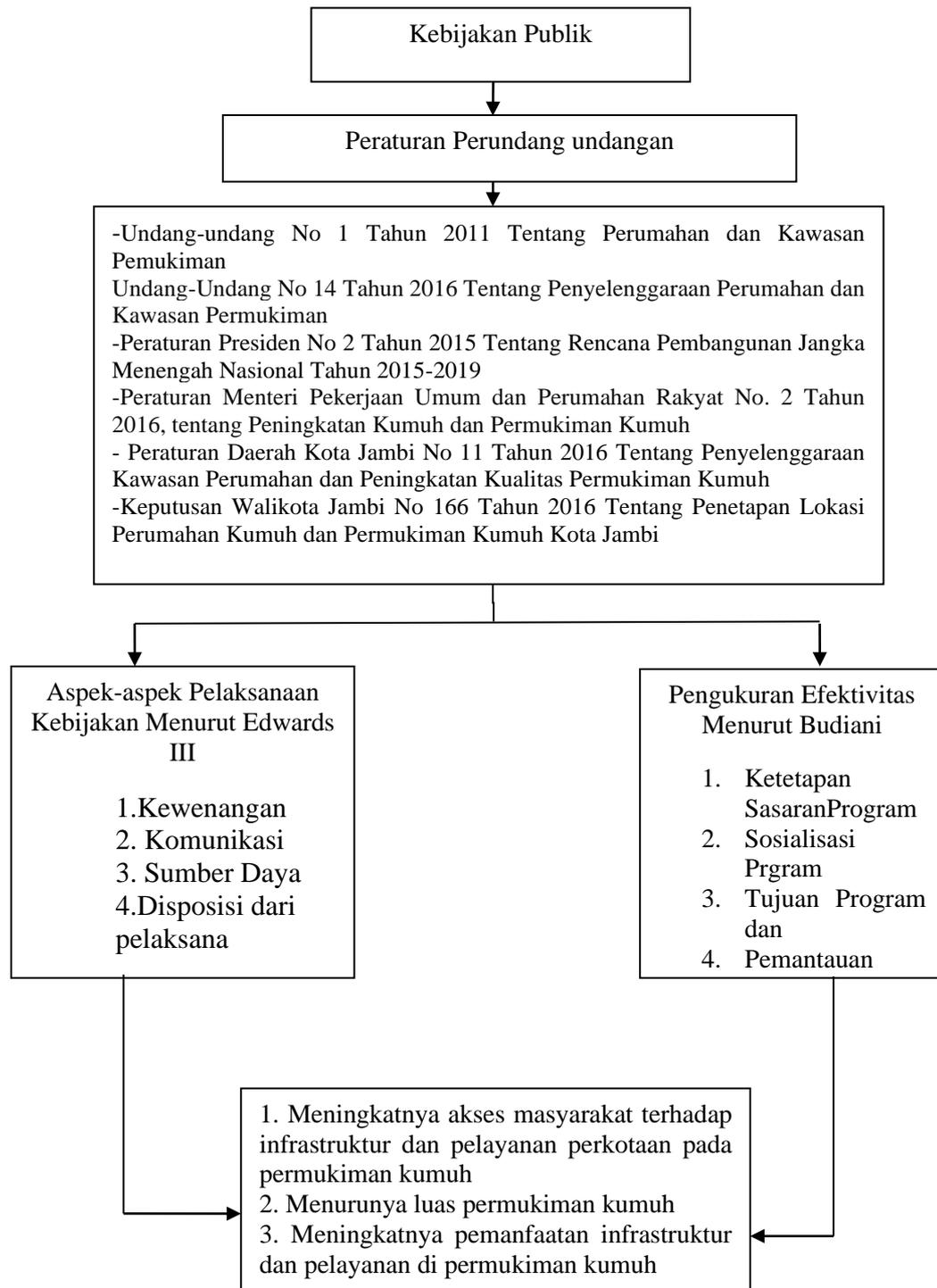
Program KOTAKU merupakan langkah yang diambil pemerintah sebagai cara untuk menangani kawasan kumuh. Adapun tujuan Program KOTAKU adalah untuk mengurangi lingkungan permukiman kumuh dan mencegah pembentukan kumuh baru, terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni dan

¹⁹Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan menjadi kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bertanggung jawab.

²⁰Dilihat dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Strategi pelaksanaan kebijakan, implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019

berkelanjutan dengan melakukan pembangunan infrastruktur juga memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Agar tujuan dari Program KOTAKU dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal program yang sangat perlu dilakukan pengukuran efektivitas dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang telah direncanakan dan ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Program KOTAKU di Kelurahan Legok dengan analisis yang dikemukakan sebagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan teori ini dapat menganalisis Program KOTAKU berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sebelumnya.

Gambar 2. Model Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

Dalam konteks ini, metode penelitian adalah serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian data ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi lingkungan alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, beragam sumber data, analisis data induktif dan deduktif, makna dari para partisipan, rancangan yang berkembang, reflektivitas, pandangan menyeluruh.²¹ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara konkret tentang keadaan objek atau masalah, penelitian ini berusaha mendeskripsikan kebijakan pemerintah Program KOTAKU di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

²¹John w. creswell, "Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran" Edisi IV (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016) hlm 247-249

1.7.2. Lokasi Penelitian /Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kabupaten Kota Jambi. Lokasi di Provinsi Jambi Negara Indonesia, dan Kelurahan Legok memiliki luas wilayah 198,00 Ha. Yang terletak di Sebelah Utara Berbatasan dengan sungai Batanghari, Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Murni, Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Sungai Putri dan Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Beringin kec. Pasar jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).²²Fokus penelitian ini terletak pada analisis kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam Program KOTAKU untuk pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau sipin Kota Jambi.

²²Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CetXXV, (Bandung: Alfabeta ,2012), Hlm 286-287

1.7.4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dipilih dalam data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dilapangan melalui teknik pengumpulan (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi) yang akan ditelusuri dari dokumen ataupun arsip baik yang telah diterbitkan maupun tidak, yang terkait dengan analisis kebijakan pemerintah Program KOTAKU dalam pengentasan pemukiman kumuh di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Sementara itu, data sekunder akan ditelusuri dari berbagai buku, jurnal, majalah, maupun informasi dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang akan digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²³ Peneliti memilih informan sebagai sampel dengan memilih informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang ada, dan memiliki kompetensi dengan topik yang akan diteliti.

²³*Ibid.*, Hlm. 300

Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Staff Seksi di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Tim koordinator Program KOTAKU (PERKIM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
3. Camat Danau Sipin, Lurah Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi
4. Lima (5) Masyarakat Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi.

Dengan alasan ketiga informan tersebut berkaitan erat dengan penelitian ini, dimana Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nantinya akan dapat memberikan data dan informasi seputar luasnya permukiman kumuh di Kelurahan Legok dan juga profil kelurahan legok itu sendiri, sedangkan camat danau sipin akan memberikan informasi seputar luas permukiman kumuh di Kelurahan Legok, dan lima masyarakat legok yang diperlukan data secara langsung untuk mengetahui dampak Program KOTAKU tersebut untuk mengatasi permukiman kumuh, yang artinya apakah masyarakat sudah mengalami dampak Program KOTAKU di Kelurahan Legok tersebut.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik cara terstruktur maupun semistruktur.²⁴

2. Wawancara

Peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan-hadapan (*face-to-face interview*) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam wawancara dalam kelompok tertentu (*focus group interview*) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok.²⁵

3. Dokumentasi

Dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data primer, berupa dokumen (Koran, makalah, laporan kantor, buku harian, diari, surat, e-mail) dan juga materi audiovisual (berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi).²⁶

²⁴John w. creswell, "RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran" Edisi IV (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016) Hlm. 253

²⁵*Ibid.*, Hlm. 254

²⁶*Ibid.*, Hlm. 255

1.7.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Antara lain:

1. Reduksi Data/ *data reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁷

2. Penyajian Data/ *data display*

Setelah data direduksi, maka selanjutnya dengan melakukan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau table. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

²⁷Sugiyono, *Op. Cit.*, Hlm. 338

menyajikan data adalah dengan teks naratif. Dengan display data maka akan mempermudah untuk melakukan pemahaman apa yang terjadi, merencanakan penelitian kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif juga dengan gambar bahkan grafik maupun chart.

3. Verifikasi/ *conclusion drawing*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁸

²⁸*Ibid.*, Hlm. 345